E-ISSN : 2809-0896
E-ISSN : 2809-0896

KOMITMEN KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN ISLAM

DR. H. Encep Safrudin Muhyi,. MM,.M.Sc
(Penulis Adalah : Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten)

Historis Kementerian Agama

Kementerian Agama lahir dalam system tata Negara Indonesia dari sebuah dialetika yang konstruktif kebangsaan yang saat itu tengah mencari jatidiri. Kelahiran diawali dari sebuah konsesus antara Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dengan Gabungan Politik Indonesa (GAPI) menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda pada tahun 1941 dan diusulkan dalam sidang BPUPKI, pada saat itu disepakati nama kementerian urusan agama yaitu Kementerian Urusan Agama Islam yang mempunyai fungsi mengurus persoalan persoalan agama secara utuh. Kemudian muncul usulan dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) *(Baca : DPR Sekarang)*, yang diusulkan oleh fraksi Islam untuk dibentuk sebuah departemen yang bertanggungjawab dibidang agama tersendiri. Usulan tersebut diterima secara aklamasi pada tanggal 26 November 1945 dan disetujui oleh pemerintah. Hingga pada akhirnya pada tanggal 3 Januari 1946 Presiden Soekarno menandatangani ketetapan Presiden tentang Kementerian Agama, inilah awal mula lahirnya Kementerian Agama. Pada akhirnya setiap Tanggal 3 Januari ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun Kementerian Agama yang sekarang dikenal dengan : ***"HARI AMAL BHAKTI"*** dan Menteri Pertamanya yaitu KH. M. Rasyidi. Tinggal bagaimana kita sebagai generasi penerusnya menjaga, bekerja dan mengabdi secara profesional, agar kementerian agama lebih dipercaya oleh masyarakat.

Sebagai sebuah organisasi memerlukan efektifitas langkah dan strategis guna mewujudkan visi, misi dan program kerja yang disusun, tidak mudah untuk mewujudkan semua itu, diperlukan kebersamaan dan dapat koordinasi untuk melaksanakan program tersebut. Kementerian Agama salah satu kementerian di Indonesia yang menangani berbagai hal program yang terkait dengan masalah diferensi keagamaan. Existensi Kementerian Agama semakin menunjukkan makna yang penting dan strategis dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Kementerian Agama secara filosofis memiliki mandate konstitusional untuk membentuk karakter bangsa dalam pengembagan etika, moral dan spiritual masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Kementerian Agama mempunyai visi yaitu: Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang taat beragama,

E-ISSN : 2809-0896
E-ISSN : 2809-0896

rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Adapun Misinya yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Kementerian Agama pun mempunyai focus program antara lain :

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama.
2. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
3. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, mengejar ketingggalan dan pemberdayaan tenaga pendidikan dan kependidikan.
4. Revitalisasi penyelenggaraan ibadah haji.
5. Penanganan Kerukunan umat beragama.

Adapun kode etik Kementerian Agama yaitu : Kami Pegawai Kementerian Agama Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa :

1. ***Menjunjung Tinggi Persatuan Dan Kesatuan***
2. ***Mengutamakan Pengabdian Dan Pelayanan Kepada Masyarakat***
3. ***Bekerja Dengan Jujur, Adil Dan Amanah***
4. ***Melaksanakan Tugas Dengan Disiplin, Profesional Dan Inovatif***
5. ***Setiakawan Dan Bertanggung Jawab Atas Kesejahteraan Korps***

Selain hal tersebut Kementerian Agama pun mempunyai 5 (lima) Nilai Budaya Kerja antara lain :

1. ***Integritas***, keselarasan hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik dan benar.
2. ***Profesionalitas***, bekerja secara disiplin, kempeten dan tepat waktu dengan hasil terbaik.
3. ***Inovasi***, menyempurnakan yang telah ada dan mengkreasi hal yang baru yang lebih baik.
4. ***Tanggungjawab***, Bekerja dengan cerdas, tuntas dan konsekwen sesuai aturan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

E-ISSN : 2809-0896
E-ISSN : 2809-0896

5. ***Ketauladanan***, Menjadi suri tauladan atau contoh bagi oranglain.

Persoalan Pendidikan Islam

Agama Islam adalah agama yang universal, yang mengajarkan kepada manusia seluruh aspek kehidupan duniawi. Islam adalah agama yang fitrah, dengan ajarannya yang sesuai dengan tabiat manusia. Penciptaan manusia berbeda dengan penciptaan makhluk lainnya. Manusia memiliki berbagi potensi kodrati yang digunakan sebagai bekal untuk menjalani hidupnya dan mengelola alam sekitarnya. Untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi tersebut, sehingga dapat bermanfaat dan berguna, maka diperlukan bimbingan, dorongan, pengarahan dan pendidikan yang lebih intensif dari semua pihak. Termasuk di dalamnya adalah dari lembaga-lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan Islam seperti pendidikan islam atau pondok pesantren. Dengan demikian maka sangat pentinglah peranan lembaga pendidikan Islam dalam menciptakan peserta didik yang berkualitas, baik dalam intelektual, emosional dan spiritual. Pendidikan Islam sebagai sebuah upaya untuk mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia agar lebih maju dengan berlandasan nilai-nilai yang tinggi dan hidup yang mulia, sehingga terbentuk kepribadian yang sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan, (Bukhori, 2010; 27-28).

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan secara umum, yaitu tercapainya kedewasaan rohani dan jasmani anak serta kemandirian anak, yang didalamnya berisi standar nilai-nilai yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk menjalankan individualitas dan sosialitas sebagai manusia. Sementara itu pendidikan Islam pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdiri dari berbagai komponen yang meliputi: tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, alat sebagai sarana pendidikan, dan kegiatan-kegiatan pendidikan. Untuk itu komponen pendidikan merupakan modal dasar yang harus diperhatikan dengan baik, termasuk dalam komponen pendidikan Islam itu adalah evaluasi atau penilaian terhadap hasil pendidikan Islam baik dilembaga pendidikan umum, Pendidikan Islam dan juga pondok pesantren, khususnya dalam hal kemandirian santrinya.

Pendidikan dewasa ini masih menghadapi aneka persoalan. Persoalan itu memang tidak akan pernah selesai, karena substansi yang ditransformasikan selama proses pendidikan dan pembelajaran selalu berada di bawah tekanan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan masyarakat. Beberapa persoalan pendidikan saat ini di antaranya adalah rendahnya mutu *input*, *process*, dan *output* pendidikan, komitmen masyarakat dan pemerintah yang belum sepenuhnya memadai untuk membangun pendidikan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia, buku pelajaran silih berganti, kurikulum terlalu tinggi tuntutannya sehingga membebani anak, intervensi kekuasaan terhadap pelaksanaan pendidikan terlalu tinggi, otonomi daerah yang setidaknya untuk sementara mencemaskan bagi kemajuan pendidikan, sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai, lemahnya kompetensi

E-ISSN : 2809-0896
E-ISSN : 2809-0896

dan profesionalisme guru, daya bayar masyarakat terhadap pendidikan masih lemah, jeritan guru bukan pegawai negeri sipil bergaji kecil dan sering terlambat, ketidak objektifan rekrutmen kepala sekolah dan pengawas, kolusi dalam rekrutmen calon guru, infisiensi pengelolaan anggaran pendidikan, konflik antara komite sekolah dengan pihak sekolah, kepemimpinan kepala sekolah yang cenderung transaksional, angka putus sekolah yang masih tinggi, dan lainnya.

Dari berbagai persoalan pendidikan tersebut, problematika seputar guru, peserta didik, dan kurikulum ternyata sangat menarik untuk dicermati lebih lanjut, terutama berkaitan aspek manajarialnya. Manajemen guru/pendidik, peserta didik, dan kurikulum pada lembaga-lembaga pendidikan kita diduga masih 'amburadul', efeknya kualitas lembaga pendidikan tertinggal jauh dari lembaga pendidikan di Negara lain.

Realitas pendidikan yang berada dalam mutu yang rendah itu meniscayakan kebutuhan akan pemimpin yang baik, yang oleh penulis buku ini diistilahkan dengan kepemimpinan transformatif *(transformative leadership)*. Kepemimpinan transformatif adalah model kepemimpinan yang memungkinkan orang (pemimpin dan yang dipimpin) bisa bekerja secara efektif dan efesien sesuai dengan posisinya masing-masing dalam rangka memenuhi tujuan yang diinginkan. Jika diidentifikasi pendapat para ahli ditemukan beberapa karakteristik tertentu yang dimiliki oleh pemimpin transformatif, di mana ciri-ciri itu bukan berdasarkan kecerdasan, kualifikasi, dan bentuk fisik seseorang. Namun, pemimpin tranformatif adalah mereka yang memiliki sifat-sifat dan karakter tertentu.

Dengan mengacu kepada konsep kepemimpinan dalam al-Qur'an dan mengadaptasi teori kepemimpinan transformatif yang dikemukakan oleh para tokoh Barat seperti Gayla Hodge (2009), David Hakala (2008), Boyatzis (1992), Sellner (1982), dan Barner (1998), maka dapat dirumuskan beberapa kriteria kepemimpinan transformatif dalam pendidikan Islam, yaitu: (1) *envision* (memiliki visi yang jelas); (2) *integrity* (memiliki integritas); (3) *dedication* (memiliki dedikasi); (4) *magnanimity* (mempunyai keluhuran budi); (5) *humility* (bersikap rendah hati); (6) *openness* (terbuka terhadap saran dan kritik); (7) *creativity* (kreativitas; (8) *assertiveness* (ketegasan); dan *sense of humor* (memliki rasa humor).

Salah satu komponen yang turut bertanggungjawab dalam upaya perubahan dan perbaikan pendidikan adalah kepala sekolah, salah satu perannya adalah mentransformasikan potensi sumber daya manusia dilingkungan sekolah yang berada di bawah kepemimpinannya menjadi aksi nyata akan membawa perubahan positif

Pada kenyataannya pendidikan merupakan bagian kebutuhan mendasar manusia yang harus dipenuhi seperti halnya pangan, sandang, perumahan dan kesehatan. Pendidikan juga merupakan suatu bagian dari politik, karena peran negara sangat vital dalam penyelenggaraan suatu pendidikan. Sistem

E-ISSN : 2809-0896
E-ISSN : 2809-0896

pendidikan yang terselenggara bersumber pada ideologi yang dianut oleh negara, karena melalui ideologilah sistem pendidikan terbangun demi pencapaian tujuan yang diinginkan oleh ideologi tersebut. Pada negara yang menganut ideologi sekuler yang berupa ide pemisahan urusan agama (akhirat) dengan dunia maka sistem pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang berkepribadian sekuler dan memisahkan agamanya dalam pengaturan kehidupan. Sedangkan negara yang menganut komunis akan menyelenggarakan pendidikan yang bertujuan pembentukan pribadi yang sesuai dengan ajaran komunis. Begitu juga dengan negara yang menganut ideologi Islam akan menyelenggarakan pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang berkepribadian kuat dan mampu menguasai ilmu pengetahuan di berbagai bidang yang sesuai dengan tuntunan agama.

Pembangunan Nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur serta pengembangan diri baik yang berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang yang berakar pada kebudayaan bangsa. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab pendidikan maka arah pendidikan didasarkan pada aspek-aspek pembentukan kepribadian manusia, yaitu: *Pertama* Pengembangan manusia sebagai makhluk individu, *Kedua* Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial, *Ketiga* Pengembangan manusia sebagai makhluk susila dan *Keempat* Pengembangan manusia sebagai makhluk religius.

Komitmen Kemenag Meningkatkan Lembaga Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah institusi pendidikan paling awal yang mengajarkan nilai-nilai Islam di Indonesia. Ia berkembang jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Karena dipandang sebagai aset umat Islam, Pendidikan Islam akhirnya dikelola di bawah naungan Departemen Agama (kini Kementerian Agama) sejak paska kemerdekaan hingga kini. Sejak itulah Pendidikan Islam mengalami banyak perubahan dan sekaligus tantangan.

Stigma miring tentang Pendidikan Islam seperti tradisional dan sarang teroris masih terasa sampai sekarang, meskipun itu tidak terbukti sama sekali. Stigma tersebut acapkali membuat masyarakat minder dan tidak bangga terhadap institusi Pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam merupakan akar pendidikan (*root of education*) Indonesia yang telah melahirkan *leader* dalam bidang pendidikan dan agama (*scholar*), negarawan dan bahkan pahlawan. Sebut saja misalnya Wahid Hasyim, Hamka, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Nurcholis Madjid (Cak Nur), Hasyim Muzadi dan Mahfudz MD.

E-ISSN : 2809-0896
E-ISSN : 2809-0896

Mereka adalah lulusan Pendidikan Islam yang telah memberikan kontribusi bagi perkembangan karakter bangsa. Dari sini, tak salah bila dikatakan Pendidikan Islam adalah kontributor terpenting bagi peradaban Islam nusantara.

Bahkan apabila ditarik ke dalam konteks global, Islam Indonesia akan menjadi penyangga peradaban Islam dunia ke depan. Cita-cita ini bukan omong kosong belaka, sebab Indonesia telah memiliki potensi-potensinya. Bayangkan saja, penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam memiliki pandangan yang sangat moderat (inklusif, terbuka, bisa menerima perbedaan, toleran) di tengah banyaknya negara Islam yang sedang berkonflik , meskipun tidak kita pungkiri masih ada sedikit gejolak konflik ras, suku dan agama di Indonesia. Namun secara umum, dunia sudah mengakui bahwa Indonesia telah berhasil mengatasi konflik, melindungi HAM umat beragama dan membangun toleransi. Hal ini terbukti dengan terlepas dari persoalan pro dan kontra, diberikannya World Statesman Award 2013 oleh Appeal of Conscience Foundation (ACF) kepada Presiden SBY 30 Mei 2013 lalu. Sikap-sikap moderat itu pada dasarnya sudah ditanamkan dan diajarkan di dalam pendidikan Islam, yakni Pendidikan Islam (Tingkat Raudhatul Athfal, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan bahkan Aliyah).

Kini Kementerian Agama telah menaungi sekitar 49.337 Pendidikan Islam seluruh Indonesia dari berbagai tingkatan Negeri maupun Swasta. Angka tersebut adalah potensi besar bagi sumbangsih Pendidikan Islam dalam menciptakan generasi terbaik berikutnya. Banyak negara yang melirik Islam dan tertarik untuk mempelajarinya, salah satunya adalah Jerman. Jerman negara yang sudah maju dengan infrastruktur yang mapan, telah diberlakukan mempelajari agama Islam di sekolah-sekolah umum. Pelajaran agama Islam diajarkan oleh guru yang beragama Islam. Sampai sekarang, Jerman masih kekurangan guru agama Islam. Sebuah lembaga pendidikan pencetak guru Islam di Jerman hanya mampu melahirkan 200 guru agama Islam pertahun, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah 10.000 guru agama Islam pertahun. Di Indonesia pendidikan Islam telah berjalan di Pendidikan Islam-Pendidikan Islam bahkan sebelum kemerdekaan. Selain itu, Pendidikan Islam harus mampu mempertegas, membuat dan mempertahankan *points of difference* (titik-titik perbedaan) atau distingsi dengan sekolahan lain. Ciri keislaman yang melekat pada Pendidikan Islam harus diterjemahkan menjadi program-program yang mampu menghasilkan keluaran yang unik dibandingkan dengan keluaran sekolah pada umumnya. Inilah yang menjadi *added value.* Pemegang kebijakan Pendidikan Islam dituntut perhatiannya untuk memperbaiki Pendidikan Islam secara bertahap demi masa depan generasi bangsa. Arahnya adalah Pendidikan Islam tidak hanya memberikan metode pengajaran baru dan sistem lainnya seperti sistem kelas, buku-buku teks baru, mengajarkan sains dan pengetahuan agama Islam lainnya, tetapi Pendidikan Islam harus juga berfungsi sebagai wadah diseminasi gagasan-gagasan

E-ISSN : 2809-0896
E-ISSN : 2809-0896

reformasi Islam. Pendidikan Islam menjadi lokus bagi penciptaan muslim progresif modern. Oleh sebab itu, rasanya sudah menjadi tanggung jawab umat Islam bersama untuk terus mengembangkan Pendidikan Islam sebagai salah satu bentuk *amal jariyah* dan kebanggaan kita. Tantangan ke depan sangatlah jelas, bagaimana Pendidikan Islam mampu mencetak akademisi atau *scholar* yang mampu membawa nama Islam Indonesia ke kancah dunia dan mampu menjadi penyangga peradaban Islam dunia.

Pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan Islam kini ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Munculnya SKB tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri dalam Negeri) menandakan bahwa eksistensi Pendidikan Islam sudah cukup kuat beriringan dengan sekolah umum. Di samping itu, munculnya SKB tiga menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu Pendidikan Islam baik dari status, nilai ijazah maupun kurikulumnya. Di dalam salah satu diktum pertimbangan SKB tersebut disebutkan perlunya diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Pendidikan Islam agar lulusan dari Pendidikan Islam dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Sebagai upaya inovasi dalam Sistem Pendidikan Islam, Pendidikan Islam tidak lepas dari berbagai problema yang dihadapi. Problema-problema tersebut antara lain :

1. Pendidikan Islam telah kehilangan akar sejarahnya, artinya keberadaan Pendidikan Islam bukan merupakan kelanjutan pesantren, meskipun diakui bahwa pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia.
2. Terdapat dualisme pemaknaan terhadap Pendidikan Islam. Di satu sisi, Pendidikan Islam diidentikkan dengan sekolah karena memiliki muatan secara kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum. Di sisi lain, Pendidikan Islam dianggap sebagai pesantren dengan sistem klasikal yang kemudian dikenal dengan Pendidikan Islam diniyah.
3. Sebagai sub sistem pendidikan nasional, Pendidikan Islam belum memiliki jati diri yang dapat dibedakan dari lembaga pendidikan lainnya.
4. Diakui bahwa model pendidikan Pendidikan Islam di dalam perundang-undangan negara, memunculkan dualisme sistem Pendidikan di Indonesia. Dualisme pendidikan di Indonesia telah menjadi dilema yang belum dapat diselesaikan hingga sekarang. Dualisme ini tidak hanya berkenaan dengan sistem pengajarannya tetapi juga menjurus pada keilmuannya. Pola pikir yang sempit cenderung membuka gap antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. Seakan-akan muncul ilmu Islam dan ilmu bukan Islam (kafir). Padahal dikhotomi keilmuan ini justru menjadi garapan bagi para pakar pendidikan Islam untuk berusaha menyatukan keduanya. Dualisme pendidikan Islam juga muncul dalam bidang manajerialnya, khususnya di lembaga swasta. Lembaga swasta umumnya memiliki dua top manager

E-ISSN : 2809-0896
E-ISSN : 2809-0896

yaitu kepala Pendidikan Islam dan ketua yayasan (atau pengurus). Meskipun telah ada garis kewenangan yang memisahkan kedua top manager tersebut, yakni kepala Pendidikan Islam memegang kendali akademik sedangkan ketua yayasan (pengurus) membidangi penyediaan sarana dan prasarana, sering di dalam praktik terjadi overlapping. Praktek manajemen di Pendidikan Islam sering menunjukkan model manajemen tradisional, yakni model manajemen paternalistik atau feodalistik. Dominasi senioritas semacam ini terkadang mengganggu perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Munculnya kreativitas inovatif dari kalangan muda terkadang dipahami sebagai sikap yang tidak menghargai senior. Kondisi yang demikian ini mengarah pada ujung ekstrem negatif, hingga muncul kesan bahwa meluruskan langkah atau mengoreksi kekeliruan langkah senior dianggap tabiat su'ul adab.

5. Kesenjangan antara Pendidikan Islam swasta dan Pendidikan Islam negeri pun tampaknya juga menjadi masalah yang belum tuntas diselesaikan. Gap tersebut meliputi beberapa hal seperti pandangan guru, sarana dan prasarana, kualitas input siswa dan sebagainya yang kesemuanya itu berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada mutu pendidikan. Yang demikian ini karena munculnya SKB tiga menteri tersebut belum diimbangi penyediaan guru, buku-buku dan peralatan lain dari departemen terkait.

Persepsi masyarakat terhadap Pendidikan Islam di era modern belakangan semakin menjadikan Pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan yang unik. Di saat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, di saat filsafat hidup manusia modern mengalami krisis keagamaan dan di saat perdagangan bebas dunia makin mendekati pintu gerbangnya, keberadaan Pendidikan Islam tampak makin dibutuhkan orang. Terlepas dari berbagai problema yang dihadapi, baik yang berasal dari dalam sistem seperti masalah manajemen, kualitas input dan kondisi sarana prasarananya, maupun dari luar sistem seperti persyaratan akreditasi yang kaku dan aturan-aturan lain yang menimbulkan kesan Pendidikan Islam sebagai 'sapi perah', Pendidikan Islam yang memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh model pendidikan lainnya itu menjadi salah satu tumpuan harapan bagi manusia modern untuk mengatasi keringnya hati dari nuansa keagamaan dan menghindarkan diri dari fenomena demoralisasi dan dehumanisasi yang semakin merajalela seiring dengan kemajuan peradaban teknologi dan materi. Sebagai jembatan antara model pendidikan pesantren dan model pendidikan sekolah, Pendidikan Islam menjadi sangat fleksibel diakomodasikan dalam berbagai lingkungan. Di lingkungan pesantren, Pendidikan Islam bukanlah barang yang asing, karena memang lahirnya Pendidikan Islam merupakan inovasi model pendidikan pesantren. Dengan kurikulum yang disusun rapi, para santri lebih mudah mengetahui sampai di mana tingkat penguasaan

E-ISSN : 2809-0896
E-ISSN : 2809-0896

materi yang dipelajari. Dengan metode pengajaran modern yang disertai audio visual aids, kesan kumuh, jorok, ortodok, dan exclusive yang selama itu melekat pada pesantren sedikit demi sedikit terkikis. Masyarakat metropolit makin tidak malu mendatangi dan bahkan memasukkan putra-putrinya ke pesantren dengan model pendidikan Pendidikan Islam. Baik mereka yang sekedar berniat menempatkan putra-putrinya pada lingkungan yang baik (agamis) hingga yang benar-benar menguasai ilmu yang dikembangkan di pesantren tersebut, orang makin berebut untuk mendapatkan fasilitas di sana. Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, misalnya, penuh dengan putra putri konglomerat, sekali daftar tanpa mikir bayar, lengkap sudah fasilitas didapat. Ma'had Al-Zaitun yang berlokasi di daerah Haurgelis (sekitar 30 KM dari pusat kota Indramayu), yang baru berdiri pada tahun 1994, juga telah menjadi incaran masyarakat modern kelas menengah ke atas, bahkan sebagian muridnya berasal dari negara-negara sahabat, seperti Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam. Dengan demikian, model pendidikan Pendidikan Islam di lingkungan pesantren telah memiliki daya tawar yang cukup tinggi.

Melihat kenyataan seperti itu, tuntutan pengembangan Pendidikan Islam akhir-akhir ini dirasa cukup tinggi. Pengembangan Pendidikan Islam di pesantren yang pada umumnya berlokasi di luar kota dirasa tidak cukup memenuhi tuntutan masyarakat. Oleh karena itu banyak model pendidikan Pendidikan Islam bermunculan di tengah kota, baik di kota kecil maupun di kota-kota metropolitan. Meskipun banyak Pendidikan Islam yang berkembang di luar lingkungan pesantren, budaya agamanya, moral dan etika agamanya tetap menjadi ciri khas sebuah lembaga pendidikan Islam. Etika pergaulan, perilaku dan performance pakaian para santrinya menjadi daya tarik tersendiri, yang menjanjikan kebahagiaan hidup dunia akhirat sebagaimana tujuan pendidikan Islam. Realitas menunjukkan bahwa praktek pendidikan nasional dengan kurikulum yang dibuat dan disusun sedemikian rupa bahkan telah disempurnakan berkali-kali, tidak hanya gagal menampilkan sosok manusia Indonesia dengan kepribadian utuh, bahkan membayangkan realisasinya saja terasa sulit. Pendidikan umum (non Pendidikan Islam) yang menjadi anak emas pemerintah, di bawah naungan Depdiknas, telah gagal menunjukkan kemuliaan jati dirinya selama lebih dari tiga dekade. Misi pendidikan yang ingin melahirkan manusia-manusia cerdas yang menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kekuatan iman dan taqwa plus budi pekerti luhur, masih tetap berada pada tataran ideal yang tertulis dalam susunan cita-cita (perundang-undangan). Tampaknya hal ini merupakan salah satu indikator dimana pemerintah kemudian mengakui keberadaan Pendidikan Islam sebagian dari sistem pendidikan nasional.

Pendidikan moral yang dilaksanakan melalui berbagai cara baik kurikuler (Pendidikan Nasional dan Ketahanan Nasional atau PPKN) maupun ko kurikuler (Penataran P-4) telah melahirkan elit politik yang tidak mampu tampil sebagai uswatun hasanah (teladan yang baik) bahkan memberikan

E-ISSN : 2809-0896
E-ISSN : 2809-0896

kesan korup dan membodohi rakyat. Kegiatan penataran dan cerdas cermat P-4 (Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila) tidak lebih dari aktivitas ceremonial karakteristik. Disebut demikian karena kegiatan tersebut telah meloloskan para juara dari peserta yang paling mampu menghafal buku pedoman dan memberikan alasan pembenaran, bukan mereka yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancsila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, para peserta penataran atau cerdas cermat P-4 berlomba-lomba menghafal butir-butir Pancasila tanpa berusaha melaksanakannya di dalam kehidupan nyata. Itulah di antara faktor yang mempengaruhi turunnya moralitas bangsa ini.

Setelah kebobrokan moral dan mental merebak dan merajalela, orang baru bangun dan sadar bahwa pendidikan moral yang selama ini dilakukan lebih berorientasi pada pendidikan politik pembenaran terhadap segala pemaknaan yang lahir atas restu regim yang berkuasa. Upaya pembinaan moral yang bertujuan meningkatkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan cita-cita nasional yang tertuang dalam perundang-undangan telah dikesampingkan dan menjadi jauh dari harapan.

Keberhasilan pendidikan secara kuantitatif didasarkan pada teori Benjamin S. Bloom (1956) yang dikenal dengan nama Taxonomy of Educational Objectives, yang mencakup tiga domain yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Meskipun demikian, keberhasilan output (lulusan) pendidikan hanyalah merupakan keberhasilan kognitif. Artinya, anak yang tidak pemah shalat pun, jika ia dapat mengerjakan tes PAI (Pendidikan Agama Islam) dengan baik maka ia bisa lulus (berhasil), dan jika nilainya baik, maka ia pun dapat diterima pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Lain halnya dengan outcome (performance) seorang alumni Pendidikan Islam, bagaimanapun nilai raport dan hasil ujiannya, moral keagamaan yang melekat pada sikap dan perilakunya akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan lembaga pendidikan yang menjadi tempat ia belajar. Karena itulah keberhasilan out-come disebut keberhasilan afektif dan psikomotorik.

Bagi lembaga pendidikan "Pendidikan Islam", kedua standar keberhasilan (output dan outcome) yang mencakup tiga domain taxonomy of educational objectives, tidak dapat dipisahkan. Di samping Pendidikan Islam mendidik kecerdasan, ia juga membina moral dan akhlak siswanya (Al-Abrasyi, 1970; Abdullah, 1994). Itulah nilai plus Pendidikan Islam dibandingkan sekolah umum yang menekankan pembinaan kecerdasan intelek (aspek kognitif).

Munculnya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberi peluang kepada peserta didik untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, tidak mengagetkan para pengelola Pendidikan Islam. Pendidikan Islam juga lebih survive dalam kondisi perubahan kurikulum yang sangat cepat, karena kehidupan Pendidikan Islam

E-ISSN : 2809-0896
E-ISSN : 2809-0896

tidak taklid kepada kurikulum nasional. Manajemen desentralisasi memberikan kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan PBM sesuai dengan kebutuhan yang dikondisikan untuk kebutuhan lokal. Dengan demikian, maka Pendidikan Islam mendapatkan angin segar untuk bisa lebih exist dalam mengatur kegiatannya tanpa intervensi pemerintah pusat dalam upaya mencapai peningkatan mutu pendidikannya. Melalui proses belajar mengajar yang didasari dengan kebutuhan lokal, kurikulum tidak terbebani dengan materi lain yang sesungguhnya belum atau bahkan tidak relevan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik pada jenjang tersebut. Efektivitas proses belajar mengajar diharapkan bisa tercapai sehingga menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi.

Adapun meningkatnya keterlibatan pemerintah dalam pendidikan menyebabkan para pengelola Pendidikan Islam memfokuskan pada program-program tambahan sebagai sarana meningkatkan kualitas pendidikan. Program remidial dan kursus untuk meningkatkan perkembangan kognitif, sosial dan emosional dari siswa yang berkemampuan rendah dalam taraf perekonomian dan hasil belajar merupakan program-program kompensasi, bukan untuk menggantikan program-program yang ada.

Sebagai lembaga pendidikan yang lahir dari masyarakat, Pendidikan Islam lebih mudah mengintegrasikan lingkungan eksternal ke dalam organisasi pendidikan, sehingga dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kepemilikan yang tinggi dengan keterlibatan yang tinggi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat bukan lagi terbatas seperti peranan orang tua siswa yang hanya melibatkan diri di tempat anaknya sekolah. Melainkan keterlibatan yang didasarkan kepada kepemilikan lingkungan. Sesuai dengan jiwa desentralisasi yang menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, masyarakat dituntut untuk memiliki kepedulian yang tinggi memperhatikan lembaga pendidikan yang berada di lingkungan setempat. Hal ini dapat menumbuhkan sikap kepemilikan yang tinggi dengan memberikan kontribusi baik dalam bidang material, kontrol manajemen, pembinaan, serta bentuk partisipasi lain dalam rangka meningkatkan eksistensi Pendidikan Islam yang selanjutnya menjadi kebanggaan lingkungan setempat. Akhirnya Pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan Islam yang hidup dari, oleh dan untuk masyarakat belum mendapatkan sentuhan pikiran dan tangan kita semua. Peningkatan mutu tidak akan terealisir tanpa andil semua pihak. Untuk itu, demi peningkatan mutunya maka Pendidikan Islam perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan.

Penutup

Dalam rangka meningkatkan pendidikan agama Islam terhadap anak, maka peranan keluarga adalah faktor yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya usaha orangtua dalam menanamkan pendidikan agama terhadap anak. Oleh karena itu disamping mereka mendidik dan membimbing anak-

E-ISSN : 2809-0896
E-ISSN : 2809-0896

anaknya di rumah, maka mereka juga berusaha agar anak-anaknya itu mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan ditempat dimana pendidikan berlangsung. Usaha-usaha orangtua itu bukan hanya mendorong anak atau memberi batuan secara moril, akan tetapi merekapun perlu memberikan dorongan atau bantuan berupa materil, seperti alat-alat belajar dan biaya yang lain yang sangat dibutuhkan, karena suatu kegiatan dibarengi dengan pembiayaan akan berjalan dengan lancar dengan baik. Hal demikian menunjukkan betapa pentingnya kegiatan keagamaan yang harus diberikan secara rutin kepada anak dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Arti penting dari agama, yakni pada penanaman *akhlakul karimah.* Dengan otoritas yang ada pada *akhlakul karimah,* seorang muslim akan berpegang kuat pada komitmen nilai dan menjadi modal dasar pengembangan akhlak serta akidah. Dunia Barat pun sudah menyadari betapa ilmu pengetahuan tanpa agama dan moral menjadi tidak berarti. Para teknokrat di sana sudah sadar bahwa betapa pun sebuah kemajuan, dapat menjadi perusak bila tidak dibekali dengan pertimbangan moral dan agama. Agama ini berkaitan dengan usaha-usaha mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dengan keberadaan alam semesta. Agama digunakan untuk membenarkan kekejaman orang yang luar biasa terhadap orang lain, dan agama juga dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna. Adapun pendapat Durkheim bahwa agama adalah pantulan dari solideritas sosial. Sedangkan kaum sosiolog mendefinisikan agama dari kenyataan empirik dan terlihat, dan bukan berangkat dari aspek dassollen, yakni agama yang seharusnya dipraktikkan. Dan secara normatif teologis sudah pasti baik adanya. Islam mengajarkan bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada orang lain. Kesadaran untuk berbuat baik sebanyak mungkin kepada orang lain ini hubungannya antara manusia, baik pribadi maupun masyarakat lingkungannya melahirkan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hubungannya antar manusia, baik pribadi masyarakat maupun lingkungannya. Pada hakekatnya orang berbuat baik atau berbuat jahat terhadap orang lain adalah untuk dirinya sendiri.

Dasar kesejatian dan keutamaan jati diri manusia tersebut mencakup tiga hal. *Pertama*, manusia sebagai hamba Allah yang diberi anugerah keunggulan kemuliaan oleh Allah, lebih mulia dari makhluk lain ciptaan-Nya, termasuk malaikat sekali pun. *Kedua*, manusia sebagai penerima amanah Allah, dan tidak ada makhluk lain yang sanggup menerima amanah itu karena begitu beratnya. Sebagai penerima amanah Allah, Manusia dilengkapi kompetensi dan kapasitas terpakai akal dan nafsu. *Ketiga*, Manusia sebagai Khalifah Allah di bumi. Posisi dan peran kekhalifahannya, mewujudkan sifat-sifat Tuhan di dalam kehidupan nyata. Dunia merupakan medan laga bagi pertarungan antara kekuatan iblis yang selalu berupaya mencampakkan kemuliaan

E-ISSN : 2809-0896
E-ISSN : 2809-0896

manusia, dengan upaya manusia sendiri untuk mempertahankan kemuliaan itu. "Sebenarnya tugas utama manusia hanya satu yakni mempertahankan kemuliaan, yang petunjuknya ada di dalam agama."

Ditinjau dari sumbernya agama dibagi menjadi dua, yaitu agama wahyu dan agama bukan wahyu, agama wahyu adalah agama yang diterima oleh manusia dari Allah Sang Pencipta melalui Malaikat Jibril dan disampaikan serta disebarkan oleh Rasul-Nya kepada umat manusia, wahyu–wahyu dilestariakan melalui Al-Kitab, Suhuf (lembaran-lembaran tertulis) atau ajaran lisan, kemudian Agama yang bukan wahyu bersandar semata–mata kepada ajaran manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan dalam berbagai aspeknya secara mendalam. Ditinjau dari segi misi penyebarannya ada agama misionari dan agama bukan misionari, agama misionari adalah agama yang menuntut penganutnya untuk menyebarkan ajaran-ajarannya kepada manusia lainnya, sedangkan agama yang bukan misionari adalah agama yang tidak menuntut penganutnya untuk menyebarkan ajarannya kepada orang lain, jadi cukup kepada lingkungan tertentu yang menjadi misi utamanya.

Sistem nilai Islam secara umum meliputi dua bidang : Syariat yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah, dalam konteks ini syariat berisikan ketentuan tentang tata cara peribadatan manusia kepada Allah, seperti Shalat, ibadah puasa, zakat dan haji ke Baitullah, hubungan manusia dengan Allah ini disebut ibadah mahdhah atau ibadah Khusus. Syariat yang mengatur hubungan manusia secara horizontal, yakni hubungan sesama manusia dan makhluk lainnya yang disebut muamalah. Muamalah ini meliputi ketentuan perundang–undangan yang mengatur segala aktifitas hidup manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Hubungan horizontal ini disebut pula dengan istilah ibadah *Gair mahdah* atau ibadah umum, karena sifatnya yang umum dimana Allah atau Rasul-Nya tidak memerinci macam dan jenis perilakunya tetapi hanya memberikan prinsip–prinsp dasarnya saja. Sejalan dengan misi agama Islam yang diturunkan Allah kepada manusia, proses pendidikan Islam berusaha merealisasikan misi itu dalam tiap pribadi manusia yaitu menjadikan manusia sejahtera dan bahagia dalam cita Islam. Cita-cita Islam mencerminkan nilai-nilai normatif dari Tuhan yang bersifat abadi dan absolut; dalam pengamalannya tidak mengikuti selera nafsu dan budaya manusia yang berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Nilai-nilai Islam yang demikian itulah yang dikembangtumbuhkan dalam diri pribadi manusia melalui proses transformasi kependidikan. Proses diciptakannya manusia yang mentransformasikan (merubah) nilai tersebut selalu berorientasi kepada kekuasaan Allah dan ibadahnya yang menentukan keberhasilannya. Kemajuan peradaban manusia yang melingkupi kehidupannya, bagi manusia yang berkepribadian Islam, hasil proses peningkatan kualitas manusia akan tetap merasa berada dalam lingkaran hubungan vertical dengan Tuhannya dan hubungan horizontal dengan masyarakat.

E-ISSN : 2809-0896
E-ISSN : 2809-0896

Untuk memajukan kehidupan manusia itulah, maka pendidikan menjadi sarana utama yang perlu dikelola, secara sistimatis dan konsisten berdasarkan berbagai pandangan teoritikal dan praktikal sepanjang waktu sesuai dengan lingkungan hidup manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang dinamis, dan bercita-cita ingin meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam arti luas, baik lahiriah maupun batiniah, duniawi dan ukhrawi. Namun cita-cita demikian tak mungkin dapat dicapai jika manusia itu sendiri tidak berusaha keras meningkatkan kemampuannya seoptimal mungkin melalui proses kependidikan, karena proses kependidikan adalah suatu kegiatan secara bertahap berdasarkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan atau cita-cita tersebut.

Pendidikan merupakan interaksi antara siswa sebagai peserta didik dan guru sebagai pendidik, hal ini berkaitan pula dengan materi pembelajaran dan lingkungan, atau lebih dikenal dengan proses belajar mengajar atau proses pembelajaran (*Learning process*). Bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru atau sekolah sebagai lembaga pendidikan, sangat erat kaitannya dengan disiplin. Seorang siswa selalu disiplin dalam belajar, tetapi guru tidak disiplin dalam mengajar, tentu proses belajar mengajar tidak akan berhasil atau sebaliknya, tentu saja keberhasilan proses belajar mengajar memerlukan disiplin dua pihak baik guru maupun siswa, sehingga terjadi sinkronisasi antara guru dengan siswa dalam kegiatan tersebut.

Disiplin memiliki tiga bentuk. *Pertama* disiplin sebagai suatu kebiasaan yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua,* disiplin sebagai suatu kesadaran diri untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ada atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang. *Ketiga* disiplin sebagai suatu sikap mental dan posisi moral untuk senantiasa memisahkan dan tidak campuradukan antara benar dan salah, dan senantiasa menyatakan yang salah adalah salah dan benar adalah benar sebagaimana adanya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa disiplin dalam proses belajar mengajar memiliki dua sisi, yaitu, pertama fungsi disiplin dalam proses belajar mengajar, dan kedua permasalahan disiplin yang dapat mengganggu hasil dan proses belajar mengajar yang dilakukan sekolah. Setiap sekolah selalu menerapkan disiplin walaupun kebijakannya berbeda-beda tetapi polanya hampir sama yaitu dengan membuat suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap elemen sekolah yang terlibat di lembaga pendidikan khususnya sekolah seperti siswa dan guru.

Guru sebagai salah satu komponen dalam proses belajar mengajar, ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Ia harus berperan aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus guru dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru terletak tanggung jawab untuk membawa anak didiknya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Dalam rangka ini guru

E-ISSN : 2809-0896
E-ISSN : 2809-0896

tidak semata-mata sebagai "pengajar" yang *transfer of knowledge*, tetapi juga sebagai "pendidik" yang *transfer of values* dan sekaligus sebagai "pembimbing" yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. ***Wallahu A'lam***

DAFTAR PUSTAKA

Bukhori Umar . 2010. *Ilmu Pendidikan Islam.* cet. ke-1. Jakarta: Amzan, 2010.